

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshidiqqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Rajawali Press, 2012.
- Asshidiqqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pikiran Hukum, Media dan HAM*. Jakarta: Konpres, 2005
- Asshidiqqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta : Rajawali Pers, 2006
- Attamimi S Hamid A., *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta : Kanisius, 1990
- A . Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Edisi Revisi, Jakarta, Ciptat: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003
- Budiardjo, Mirriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review, Cetakan Pertama*, Yogyakarta : UII Press, 2005
- Indra, Mexsasai, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Kesatu, Bandung : PT. Refika Aditama, 2011
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, Cetakan I*, Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- M.D Mahfud, Moh, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Muhshi, Adam, *Teologi Konstitusi : Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia*, Cetakan I, Yogyakarta: PT. Lkis Printing Cemerlang, 2015
- Soebechi, Dr. Imam, *Hak Uji Materiil*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016
- Syamsuddin, Aziz, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang, Cetakan Pertama*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011
- Syamsudin M., *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim (Cet. II)*, Jakarta : Kencana, 2015
- Tricahyono, Ibnu, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, Malang : Trans Publishing, 2009

Jurnal:

Abrori, *Keabsahan Penggunaan Kewenangan Kebebasan Bertindak bagi Pemerintah (Diskresi) : Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik, Vol. 1, No. 1, Mei 2016

Abustan, *Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum Demokrasi, Sebuah Telaah Kritis*, Justicia Sains, Vol. 2, No. 2, Desember 2018

Ahmad Zazili, "Pengkakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik (Right to Vote) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", Jurnal Konstitusi, Vol .9 No. 1, 2012

Andik Abdul Rahman, *Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Anggota Legislatif Kota Balikpapan Periode 2014-2019*, eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 5, No. 3, 2017

DM Fortuna, Dewi, *Analisis Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.04/PUU-VII/2009 tentang Pencalonan Mantan Narapidana sebagai Anggota Legislatif*, (Skripsi S1 Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017

Fazzan, *Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 14, No. 2, Februari 2015

Irawan Setyo, Oktino, *Analisis Kedudukan Komisi Pemilihan Umum sebagai Lembaga Independen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Dinamika Hukum, Vol. 1, No. 2 ; Februari 2011

M. Darin Arif Mu'allifin, *Problematika dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Ahkam, Vol. 3, No. 2, November 2015

Soedarsono, 2005, *Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi: penyelesaian sengketa hasil pemilu 2004 oleh Mahkamah Konstitusi RI*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Konstitusi RI, Jakarta

Suherry, *Politik Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.7, No. 1, April 2017

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Agung no.46 P/HUM/2018.

Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018

Internet :

Moh. Dani Pratama Huzaini, “problematika-PKPU-no-20- tahun-2018- mantan-koruptor-menjadi-caleg” diakses dari <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1225-> tanggal 2 Januari 2020, Jam 19.00 WIB.

<https://akurat.co/news/id-237056-read-pembatasan-hak-dipilih-bagi-mantan-terpidanakorupsi-dalam-perspektif-hukum-dan-ham?catId=2>, diakses pada tanggal 10 Februari 2019, Jam 19.00 WIB.

[http://arsip.rumahpemilu.org/in/read/195/Penyelenggara-Pemilu-1955-Berlaku-Jujur dan Sederhana](http://arsip.rumahpemilu.org/in/read/195/Penyelenggara-Pemilu-1955-Berlaku-Jujur-dan-Sederhana), diakses pada tanggal 12 Februari 2020, Jam 20.53 WIB

[http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/5/Tugas-dan Kewenangan](http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/5/Tugas-dan-Kewenangan), diakses pada tanggal 6 Februari 2020, jam. 17.16 WIB

Iksan Fauzi, Tribun News, “220 Anggota DPR/DPRD Terindikasi Korupsi, Masih Mau Pilih Caleg? Ini Pesan KPK”, Sumber : <https://surabaya.tribunnews.com/2018/09/14/220-anggota-dprdprd-terindikasi-korupsi-masih-mau-pilih-caleg-ini-pesan-kpk>, 14 September 2018

Ahmad Islamy Jamil, inews.id “Mahkamah Agung Bolehkan Eks Napi Korupsi Nyaleg, Ini Kata Bawaslu” Sumber: <https://www.inews.id/news/nasional/mahkamah-agung-bolehkan-eks-napi-korupsi-nyaleg-ini-kata-bawaslu>, diakses 2 Februari 2020

Christian Simbolon,Idn Times.com, “Pro-Kontra Larangan Napi Koruptor Nyaleg”, <https://www.idntimes.com/christian-simbolon/pro-kontra-larangan-napi-koruptor-jadi-calon-legislatif>, Diakses 2 Februari 2020